

Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Keluarga Harapan Di Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan

Analysis of Community Empowerment in The Family Hope Program in Wayer District, Sorong Selatan Regency

John R. Sesa^{1*}, Rasyid Pananrangi², Syamsul Bahri²

¹Kantor Distrik Waywr Kabupaten Sorong Selatan

²Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

*E-mail: johnr.sesa@gmail.com

Diterima: 14 Januari 2025/Disetujui 30 Juni 2025

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, mengevaluasi implementasi PKH di wilayah tersebut dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis PKH. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui PKH mencakup peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Program ini berhasil memberikan bantuan tunai langsung kepada keluarga miskin yang berdampak positif terhadap akses pendidikan dan layanan kesehatan melalui puskesmas dan kegiatan posyandu keliling. Dari sisi ekonomi, penerima manfaat memperoleh pelatihan keterampilan dan bantuan modal untuk mendukung usaha kecil. Implementasi PKH di Distrik Wayer berjalan relatif baik, terutama dalam hal distribusi bantuan yang tepat waktu dan penetapan kriteria sasaran. Namun, masih terdapat ketidaktepatan data penerima manfaat, di mana beberapa keluarga yang berhak belum terdaftar dan sebaliknya. Permasalahan utama yang dihadapi mencakup rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat PKH, partisipasi aktif penerima yang masih terbatas, kurangnya pelatihan di wilayah terpencil, serta pendataan yang belum sepenuhnya akurat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pelatihan, dan pembaruan data untuk mengoptimalkan efektivitas program PKH sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Pemberdayaan Masyarakat, Implementasi Kebijakan, Sorong Selatan

Abstract. This study aims to: (1) analyze community empowerment through the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) in Wayer District, South Sorong Regency; (2) evaluate the implementation of the PKH program in the region; and (3) identify challenges faced in empowering communities through PKH. The research employs a qualitative approach with primary and secondary data sources, using observation, in-depth interviews, and documentation for data collection. The findings reveal that community empowerment through PKH includes improved access to education, healthcare, and economic well-being. The program has effectively provided direct cash assistance to low-income families, enhancing their access to education and free healthcare services through community health centers and mobile health posts (posyandu). Economically, beneficiaries receive skills training and capital assistance to support small businesses. The implementation of PKH in Wayer District has been relatively effective, particularly in terms of timely aid distribution and targeting based on clear criteria. However, inaccuracies in beneficiary data remain a concern, with some eligible families not listed and some ineligible ones receiving assistance. The main challenges identified include limited community understanding of the program's benefits, low participation of recipients in optimizing the aid, lack of training opportunities in remote areas, and inaccurate beneficiary data. Therefore, enhanced outreach, training initiatives, and data validation are necessary to maximize the effectiveness of PKH as a tool for community empowerment.

Keyword: Family Hope Program, Community Empowerment, Policy Implementation, South Sorong

 This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Pendahuluan

Di Indonesia Program Keluarga Harapan (PKH) diatur dari berbagai undang-undang dan peraturan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan pemberdayaan keluarga miskin. Peraturan tersebut antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; mengatur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan sosial, termasuk program PKH, yang dilaksanakan di tingkat daerah. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang ini menjadi dasar hukum untuk pengentasan kemiskinan dan menetapkan berbagai kebijakan pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan. PKH merupakan salah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Sosial. PP ini mengatur tentang pengelolaan bantuan sosial di Indonesia, termasuk penyaluran bantuan sosial seperti PKH. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban hidup masyarakat miskin. 4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Keluarga Harapan. Peraturan ini memberikan petunjuk teknis tentang pelaksanaan PKH, termasuk pengelolaan, pengawasan, serta mekanisme pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin. 5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. Menyempurnakan pelaksanaan PKH dan penyaluran bantuan, peraturan ini menekankan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial. 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Peraturan Presiden ini menjelaskan tentang kebijakan pengentasan kemiskinan secara nasional, dengan PKH sebagai salah satu instrumen utama dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. 7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan. Peraturan ini mengatur kriteria keluarga penerima manfaat dalam program PKH, yang mencakup keluarga yang tergolong miskin dan rentan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dengan memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga sangat miskin. PKH bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini menghubungkan bantuan finansial dengan kewajiban untuk melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan kualitas hidup, seperti memastikan anak-anak bersekolah dan ibu hamil memeriksakan kesehatan mereka secara rutin. Program PKH juga menciptakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang memperkuat struktur sosial dan mengurangi kesenjangan sosial. Masyarakat yang terlibat dalam program ini dapat merasakan manfaat yang lebih besar, tidak hanya dalam bentuk bantuan langsung, tetapi juga dalam peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada tingkat pengembangan masyarakat dalam memastikan keberlanjutan dan kesesuaian program dengan kebutuhan lokal. Secara normatif, keberhasilan PKH tidak hanya diukur dari seberapa banyak bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap perubahan pola hidup dan pengembangan masyarakat miskin. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam setiap tahapan PKH sangatlah vital, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil program. Kolaborasi ini menjadi model dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Kabupaten Sorong Selatan adalah salah satu kabupaten yang terletak di bagian barat Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia. Secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sorong di sebelah utara, Kabupaten Tambrauw di sebelah timur, Laut Seram di sebelah selatan, dan Kabupaten Raja Ampat di sebelah barat. Wilayah ini memiliki kondisi geografis yang sangat beragam, dengan daerah pesisir yang luas, dataran rendah, hingga pegunungan. Keberadaannya yang berada di kawasan pesisir, dengan garis pantai yang panjang dan dikelilingi oleh laut yang kaya akan sumber daya alam, memberikan keuntungan besar bagi sektor perikanan, pariwisata, dan transportasi laut. Selain itu, Kabupaten Sorong Selatan juga memiliki potensi besar dalam bidang pertanian dan kehutanan, terutama karena daerah ini memiliki hutan tropis yang lebat dengan keanekaragaman flora dan fauna.

Namun, meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, Kabupaten Sorong Selatan menghadapi berbagai tantangan dalam hal pembangunan sosial dan ekonomi. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah ini, yang berbanding terbalik dengan potensi alam yang ada. Beberapa daerah di Kabupaten Sorong Selatan masih terisolasi, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, serta lapangan pekerjaan. Isolasi geografis ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dasar, yang pada gilirannya memperburuk kualitas hidup mereka. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi menjadi masalah besar yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah dan pusat.

Wilayah-wilayah yang tersebar pada wilayah Kecamatan (distrik) yang berada di Kabupaten Sorong Selatan terdiri dari beberapa kecamatan (distrik), yaitu 15 kecamatan, 2 kelurahan, dan 121 desa. Pada tahun 2024 jumlah penduduk distrik wayer mencapai 2,625 jiwa dengan luas wilayah 317,88 km² dan sebaran penduduk 9 jiwa/km². Nama-nama distrik tersebut yaitu : distrik Teminabuan, Wayer, Saifi, Inanwatan, Kais, Kais Darat, Kokoda, Kokoda Utara, Konda, Matemani, Fokour, Aitinyo, Ayamaru, Ayamaru Timur, Mare, Aifat, Aifat Timur, Sawiat, Moswaren, Seremuk. Penyebaran wilayah tersebut adalah sebagai berikut: Daerah pegunungan; tersebar distrik Ayamaru, Ayamaru Timur, Mare, Aifat, Aifat Timur sebagian Aitinyo dan Sawiat. Begitu banyaknya Wilayah Kecamatan (distrik) di Kabupaten Sorong Selatan yang telah disebutkan di atas, dan dengan pertimbangan keterbatasan penulis untuk menjangkaunya, maka penulis akan mempersempit penelitian ini dengan terfokus pada satu wilayah Kecamatan (Distrik) yaitu kecamatan (distrik Wayer), mengingat Kecamatan (distrik) wayer masuk dalam salah satu penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sorong Selatan.

Sehubungan dengan hasil pengamatan penulis di lokasi penelitian (distrik Wayer), fenomena yang nampak terlihat antara lain :1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat PKH. 2. kurangnya partisipasi aktif dari penerima PKH dalam memanfaatkan bantuan dengan baik. 3. Kurangnya pemahaman cara memanfaatkan bantuan PKH dengan baik. 4. Kurangnya pengetahuan bagaimana menggunakan bantuan untuk meningkatkan kehidupan mereka. 5. Pendataan yang kurang akurat terkait penerima PKH. 6. Kurangnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan bagi penerima PKH, khususnya pada daerah terpencil. Terkait fenomena yang disebutkan di atas, maka dibutuhkan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pemberdayaan masyarakat pada Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap PKH, mengajak Masyarakat turut berpartisipasi dalam memanfaatkan bantuan dengan baik, memberikan pengetahuan cara memanfaatkan bantuan PKH dengan baik, pendataan penduduk yang akurat terkait penerima PKH.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, mengevaluasi implementasi PKH di wilayah tersebut dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis PKH.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor distrik Waywr Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder. Fokus dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat pada Program Keluarga Harapan (PKH) di distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan. Adapun diekripsi fokus adalah hasil yang telah dicapai oleh kantor distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan dalam mensukseskan PKH melalui Pemberdayaan Masyarakat. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini Informen dipilih secara purposive sampling sebanyak 7 orang, yang terdiri dari: kepala Distrik (1 orang), sekertaris Distrik (1 orang), Sie Kependudukan (1 orang), Sie Pemberdayaan Masyarakat (1 orang), dan masyarakat (3 Orang) Adapun teknik analisis data dillakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Pemberdayaan Masyarakat Terkait Program Keluarga Harapan (PKH) Di Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya.

Kemiskinan merupakan isu nasional sejah dahulu, sehingga perlu penanganan yang serius. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial yang bersyarat. PKH memberikan bantuan kepada keluarga miskin dengan harapan dapat meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Program ini tidak hanya fokus pada pemberian bantuan tunai, tetapi juga berupaya untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri dalam jangka panjang.

Untuk melihat Pemberdayaan masyarakat pada Program Keluarga Harapan (PKH) di distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan dapat ditelusuri melalui hasil penelitian sebagai berikut :

1. Peningkatan Akses Pendidikan

Terkait peningkatan akses pendidikan diperoleh hasil penelitian bahwa keluarga penerima PKH mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik melalui bantuan tunai langsung yang biasa di terima oleh orang tua mereka melalui penyaluran dari kantor Pos. Pemerintah distrik bekerja sama dengan lembaga Pendidikan, bekerja sama dengan sekolah dan pemerintah untuk memberikan beasiswa atau fasilitas pendidikan tambahan, juga memberikan pelatihan keterampilan bagi orang tua agar mereka dapat mendukung pendidikan anak-anak mereka. Cara yang dilakukan ini cukup efektif, meskipun masih ada tantangan. Namun dengan metode ini, banyak anak-anak dari keluarga penerima PKH sekarang bisa melanjutkan pendidikan dengan bantuan tersebut, dan ada peningkatan partisipasi orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka.

Namun Pada peningkatan akses Pendidikan ini, pemerintah distrik mengalami kendala utama yaitu terbatasnya fasilitas pendidikan yang memadai di beberapa wilayah terpencil, masih rendahnya kesadaran sebagian orang tua mengenai pentingnya pendidikan untuk masa depan anak-anak mereka, serta jarak yang cukup jauh antara sekolah dan beberapa desa terpencil. Selain itu, masih ada tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka.

Sebenarnya peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin penerima PKH di distrik Wayer berarti memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak mereka untuk mengenyam pendidikan yang layak, baik melalui bantuan biaya pendidikan, beasiswa, atau fasilitas pendidikan yang lebih baik, sehingga mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga penerima PKH mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik melalui bantuan tunai langsung yang biasa di terima oleh orang tua mereka melalui PPH ini, yang sebelumnya akses pendidikan ini belum pernah tersentuh bagi masyarakat miskin di distrik wayer Kabupaten Sorong Selatan.

2. Peningkatan Akses Kesehatan

Terkait pada Peningkatan Akses Kesehatan, diperoleh hasil penelitian bahwa pertama-tama yang dilakukan pemerintah distrik yaitu memfasilitasi layanan kesehatan dengan mendata keluarga miskin dan memastikan mereka menerima layanan kesehatan melalui puskesmas dan klinik keliling. Disamping itu pemerintah distrik menyediakan layanan kesehatan gratis di puskesmas kepada banyak keluarga miskin, memberikan informasi mengenai pentingnya kesehatan melalui pelatihan dan edukasi kepada masyarakat, meskipun masih ada kekurangan dalam distribusi layanan di daerah terpencil, memberikan obat-obatan, serta menjalin kerja sama dengan tenaga medis untuk memastikan keluarga penerima PKH mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Cara lakukan pemerintah distrik cukup efektif karena banyak keluarga miskin yang kini mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik dan terjangkau. Alan tetapi walaupun cukup efektif, pemerintah distrik juga mengalami kendala, yaitu keterbatasan fasilitas kesehatan di beberapa desa terpencil dan kurangnya tenaga medis di daerah tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terkait dengan peningkatan akses kesehatan Pemerintah distrik menyediakan layanan kesehatan gratis di puskesmas dan sering mengadakan posyandu keliling untuk keluarga miskin. Hal ini, dilakukan untuk memastikan adanya pemeriksaan kesehatan rutin untuk warga miskin.

3. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Terkait peningkatan kesejahteraan ejonomi, diperoleh hasil penelitian bahwa pemerintah distrik telah memberikan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan akses ke pasar. Hal ini berhasil mendorong masyarakat untuk membuka usaha baru dan memperbaiki usaha mereka, serta pemberdayaan kelompok masyarakat untuk meningkatkan produktivitas.

dengan bantuan modal kepada masyarakat miskin, usahanya dapat berkembang, dan kemandirian mulai terlihat. Perlakuan ini cukup efektif, karena banyak usaha kecil yang mulai berkembang. Program pelatihan dan bantuan modal membantu masyarakat meningkatkan usaha mereka, walaupun program ini masih ada kendalanya, misalnya akses pasar dan terbatasnya sumber daya untuk mendukung usaha lebih lanjut.

Dengan demikian dapat disimpulkan mengenai Peningkatan Akses Kesejahteraan Ekonomi, bahwa keluarga penerima PKH mendapatkan akses Kesejahteraan ekonomi untuk meningkatkan usaha kecil yang digelutinya melalui pelatihan keterampilan, memberikan bantuan modal untuk usaha. Apa yang dilakukan kepala distrik Wayer, cukup efektif, karena dengan bantuan modal kepada Masyarakat miskin, usahanya dapat berkembang, dan kemandirian mulai terlihat

B. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program perlindungan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan melalui pemberian bantuan langsung bersyarat kepada keluarga miskin. PKH bertujuan untuk memutuskan mata rantai kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, dengan syarat tertentu, seperti memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan keluarga tersebut memperoleh akses layanan kesehatan.

Implementasi PKH juga tidak terlepas dari tantangan, seperti ketidakteraturan dalam pendataan keluarga miskin, serta adanya ketergantungan yang bisa muncul pada beberapa keluarga. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah terus memperbaiki sistem penyaluran dan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Pelatihan bagi pendamping sosial juga dilakukan agar mereka dapat memberikan bantuan dan pendampingan secara tepat dan efektif. Untuk melihat bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan dapat ditelusuri melalui hasil penelitian, sebagai berikut :

1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Terkait Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pemerintah distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan melakukan pendataan melalui kepala kampung atau pendamping PKH di tingkat distrik dan hasilnya diserahkan ke pemerintah distrik sebagai penanggungjawab untuk memastikan jumlah penerima bantuan PKH. Jumlah KK penerima PKH di Distrik Wayer adalah 310 KPM, yang sudah terdaftar dan menerima bantuan. Dan dari hasil penelitian ditemukan kendala dalam pendataan penerima bantuan PKH, kendala utama dalam pendataan penerima bantuan adalah kesulitan dalam mengakses beberapa desa terpencil, kendala lainnya kurangnya koordinasi antar kampung dan keterbatasan sumber daya untuk mengakses daerah-daerah yang jauh, juga adanya ketidaksesuaian data antara yang dilaporkan dan yang diterima, serta beberapa keluarga yang tidak terjangkau karena domisili keluarga tersebut sulit terjangkau.

2. Terkait Tepat Sasaran (Targeting)

Terkait bantuan PKH apakah tepat sasaran atau tidak, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam memberikan Bantuan PKH kepada Masyarakat miskin punya kriteria terkait penyaluran bantuan yang benar-benar kepada mereka yang pastas menerimanya, seperti kondisi ekonomi keluarga dan status sosial mereka. Kriterianya meliputi pendapatan keluarga yang rendah, memiliki anak usia sekolah, atau anggota keluarga dengan kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian khusus seperti Ibu Hamil dan menyusui. Adapun penyaluran bantuan PKH tersebut hanya diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria yang benar-benar tepat sasaran dan terbukti membutuhkan bantuan untuk memperbaiki kesejahteraan mereka.

3. Distribusi Bantuan Yang Tepat

Terkait bantuan PKH apakah distribusi bantuannya tepat waktu atau tidak, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pemberian bantuan kepada KPM biasanya tepat waktu, dan bantuan langsung diterima di ibu kota distrik, dan dipastikan proses distribusi berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Akan tetapi walaupun penyaluran bantuan PKH tepat waktu, pemerintah distrik Wayer juga mengalami kendala, yaitu berkisar pada lebih kepada aksesibilitas bagi beberapa KPM yang tinggal di daerah jauh dari ibu kota distrik, terkadang ada keterlambatan administrasi atau masalah distribusi yang menyebabkan beberapa KPM belum menerima bantuan tepat waktu, terutama yang jauh dari pusat, akses yang terbatas atau kondisi cuaca yang menghambat distribusi, namun pemerintah distrik Wayer terus berusaha untuk mengatasi hambatan tersebut agar bantuan tetap dapat diterima tepat waktu.

C. Masalah Yang Dihadapi Terkait Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Keluarga Harapan (PKH) Di Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan oleh pemerintah untuk membantu keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan dan kesehatan. PKH juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Namun, meskipun program ini telah memberikan manfaat yang signifikan, ada beberapa masalah yang dihadapi dalam implementasi program PKH, Adapun masalah tersebut terdiri antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Manfaat PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program bantuan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang

mampu. Namun, meskipun telah berjalan cukup lama, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan tujuan dari PKH ini. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kurangnya pemahaman ini adalah kurangnya sosialisasi yang efektif.

Di beberapa daerah, terutama di kawasan pedesaan atau daerah yang terisolasi, informasi mengenai PKH seringkali tidak sampai ke masyarakat dengan cara yang mudah dimengerti. Hal ini mengakibatkan sejumlah keluarga yang seharusnya mendapatkan manfaat dari PKH tidak mengetahui cara mendaftar atau bahkan merasa program ini tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Selain itu, ada juga persepsi keliru yang berkembang di kalangan masyarakat. Beberapa orang menganggap bahwa PKH hanya memberikan bantuan uang tunai tanpa ada manfaat jangka panjang. Padahal, PKH tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan finansial, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui program pendidikan dan kesehatan, seperti kewajiban untuk anak-anak keluarga penerima manfaat agar tetap bersekolah dan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan ke fasilitas kesehatan. Namun, pemahaman yang terbatas tentang aspek ini membuat banyak orang kurang memanfaatkan program dengan optimal.

2. Kurangnya Partisipasi Aktif Dari Penerima PKH Dalam Memanfaatkan Bantuan Dengan Baik

Program Keluarga Harapan (PKH) telah lama menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial kepada keluarga kurang mampu. Namun, meskipun bantuan ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan penerima, tidak sedikit penerima yang kurang aktif dalam memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal. Kurangnya partisipasi aktif ini sering kali menjadi kendala dalam mencapai tujuan program. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman mengenai cara memanfaatkan bantuan PKH secara efektif. Beberapa penerima mungkin merasa kebingungan atau tidak terbiasa mengelola dana bantuan yang mereka terima. Tanpa adanya pendampingan atau penyuluhan yang cukup, mereka cenderung tidak tahu bagaimana cara menggunakan bantuan untuk kebutuhan produktif atau jangka panjang, yang pada akhirnya justru hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari.

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga turut memengaruhi partisipasi aktif penerima. Beberapa keluarga penerima PKH mungkin merasa malu atau tidak nyaman untuk terlibat lebih dalam dalam program ini, terutama jika ada persepsi negatif di lingkungan sekitar terkait dengan bantuan sosial. Hal ini membuat mereka lebih pasif dalam memanfaatkan bantuan, meskipun tujuan utama dari PKH adalah memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mandiri secara ekonomi.

3. Kurangnya Pemahaman Cara Memanfaatkan Bantuan PKH Dengan Baik

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu inisiatif penting yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu. Namun, meskipun bantuan ini memiliki potensi besar, tidak semua penerima manfaat mampu memanfaatkan bantuan ini secara maksimal. Salah satu faktor utama yang menjadi hambatan adalah kurangnya pemahaman tentang bagaimana cara memanfaatkan bantuan PKH dengan efektif. Bantuan PKH dirancang untuk mendukung keluarga penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan anak, kesehatan, dan kesejahteraan ibu hamil. Namun, sering kali penerima bantuan tidak tahu cara mengelola atau menggunakan dana tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya informasi yang memadai, ketidakmampuan untuk mengelola keuangan, atau bahkan kurangnya keterampilan dalam mengidentifikasi prioritas pengeluaran.

4. Kurangnya Pengetahuan Bagaimana Menggunakan Bantuan Untuk Meningkatkan Kehidupan Mereka

Di tengah kesulitan hidup, seringkali banyak individu yang terjebak dalam keadaan yang sulit tanpa menyadari bahwa ada berbagai bentuk bantuan yang dapat mereka manfaatkan untuk memperbaiki situasi mereka. Namun, salah satu tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah kurangnya pengetahuan atau pemahaman mengenai bagaimana memanfaatkan bantuan tersebut. Bantuan bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, atau bahkan dukungan finansial dari pemerintah atau organisasi non-profit. Sayangnya, banyak orang yang tidak tahu cara mengakses atau bahkan mengenali jenis bantuan yang tersedia. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya informasi, ketidakmampuan untuk memahami proses administrasi, atau bahkan rasa malu untuk mencari bantuan.

5. Pendataan Yang Kurang Akurat Terkait Penerima PKH

Pendataan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bagian krusial dalam memastikan bahwa bantuan sosial ini tepat sasaran. Namun, masih terdapat banyak tantangan dalam proses pendataan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi program tersebut. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi adalah ketidakakuratan dalam pendataan penerima. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakakuratan ini antara lain adalah kurangnya verifikasi data lapangan, kesalahan pencatatan, dan adanya perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga yang tidak tercatat dengan baik. Hal ini menyebabkan beberapa keluarga yang seharusnya menerima bantuan tidak tercakup dalam daftar penerima, sementara ada pula yang tercatat sebagai penerima meskipun kondisi mereka tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.

6. Kurangnya Kesempatan Untuk Mengikuti Pelatihan Bagi Penerima PKH, Khususnya Pada Daerah Terpencil

Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. PKH dirancang untuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang membutuhkan, dengan tujuan utama mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, meskipun bantuan ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar, tantangan besar yang sering dihadapi oleh penerima PKH adalah keterbatasan dalam mengakses pelatihan atau pengembangan keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing dan kemampuan mereka dalam bekerja atau berusaha.

Di daerah terpencil, seperti di Kabupaten Sorong Selatan masalah ini semakin terasa. Infrastruktur yang terbatas dan jarak yang jauh dari pusat-pusat pelatihan membuat akses untuk mengikuti pelatihan menjadi sangat terbatas. Hal ini memperburuk kesenjangan keterampilan antara masyarakat di daerah urban dengan mereka yang tinggal di daerah terpencil. Pelatihan yang seharusnya menjadi sarana untuk membuka peluang kerja dan mengembangkan usaha, malah menjadi sesuatu yang sulit dijangkau bagi mereka yang paling membutuhkannya.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam tiga aspek utama: pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Melalui bantuan tunai bersyarat, keluarga miskin memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta memperoleh dukungan modal dan pelatihan untuk pengembangan usaha kecil. Program ini terbukti mendorong peningkatan partisipasi anak dalam pendidikan, memperluas jangkauan layanan kesehatan melalui puskesmas dan posyandu keliling, serta menumbuhkan kemandirian ekonomi melalui pelatihan dan pendampingan.

Meskipun demikian, pelaksanaan PKH masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pendataan yang belum akurat, pemahaman masyarakat yang terbatas terhadap manfaat program, partisipasi aktif penerima yang masih rendah, serta minimnya akses terhadap pelatihan keterampilan, terutama di wilayah terpencil. Ketidaktepatan sasaran penerima juga menjadi isu penting yang memerlukan perbaikan sistem verifikasi dan validasi data. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan efektivitas PKH sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi, perbaikan mekanisme pendataan, serta perluasan akses terhadap pelatihan keterampilan dan penguatan kapasitas lokal. Dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan inklusif, PKH berpotensi menjadi katalisator bagi peningkatan kualitas hidup dan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan di wilayah pedesaan seperti Distrik Wayer.

Daftar Pustaka

- Apriyani Sinda dan Nugroho Tri. 2024. Jurnal: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata. JPMI, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Vol.6. No.2. e. ISSN :2721-2084
- Arifianto, A. (2021). Peran PKH dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus di Desa Suka Maju. Jurnal Sosial dan Kesejahteraan, 10(3), 210-223
- Giddens, A. (2009). Sociology. 6th ed. Cambridge: Polity Press.
- Laurens Samson, 2021. JURNAL BADATI, P-ISSN: 1907-5340, E-ISSN: 2722-3248, VOL 3 NO 1 APRIL 2021
- Mubyarto, S. (2016). Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Jakarta: LP3ES
- Mubyarto, P. (2000). Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: LP3ES.
- Narayan, D. (2002). Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook. World Bank.
- Nash, J. (2008). Community Empowerment: A Path to Socioeconomic Development. Oxford University Press.
- Ningsih, H. & Putri, A. S. (2019). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH): Tinjauan dari Aspek Sosial dan Ekonomi. Jurnal Sosial Ekonomi, 8(2), 124-137.
- Prasetyo dan Irawansyah (2020). Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. JMPIS. E-ISSN: 2716-375X, P-ISSN: 2716-3768.
- Sari, I. (2017). Keterlibatan Masyarakat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Sudarwan Danim. (2011). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan. Bandung: Alfabeta.
- Suwandi, P. (2010). Pemberdayaan Masyarakat: Teori, Konsep, dan Aplikasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sari, D. M. (2018). Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Pedesaan. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 12(1), 45-59.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sumber, D. (2006). Pemberdayaan Masyarakat dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2018). Analisis Dampak Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi.
- Widodo, W. (2020). Tantangan dan Peluang Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Bantuan Sosial: Studi Kasus PKH. Jurnal Pembangunan Sosial, 14(2), 120-135.
- Weber, M. (1905). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Charles Scribner's Sons.